

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan posisi yang sangat strategis yakni berada di tengah jalur Jakarta dan Surabaya dimana berpotensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Semarang terletak sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Selain itu Kota Semarang berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, merupakan perlintasan moda transportasi darat (Kereta api, Bus dan Kendaraan) dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Timur atau menuju Jawa Tengah Selatan dan Provinsi Yogyakarta.

Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang menjadi daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Berikut tabel jumlah penduduk beserta persentase peningkatan jumlah penduduk:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Persentase Kenaikan Jumlah Penduduk pada Kota
Semarang Tahun 2011-2015

No	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk	1.544.358	1.559.198	1.572.105	1.584.906	1.595.187
2.	Persentase Kenaikan	1,11	0,96	0,83	0,97	0,59

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa penduduk Kota Semarang selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 tercatat penduduk Kota Semarang berjumlah 1.544.358 jiwa dan terus meningkat sampai pada tahun 2015 dengan jumlah 1.595.187 jiwa. Persentase kenaikan jumlah penduduk di Kota Semarang dapat dikatakan cukup rendah dengan yang mana pada tahun 2011 persentase kenaikan penduduk sebesar 1,11% dan terus menurun sebesar 0,59%.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Semarang juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya. Hal ini menimbulkan masalah kemacetan di beberapa ruas jalan. Kemacetan ini sangat dirasakan oleh semua masyarakat Kota Semarang. Pada hari biasa saja, jalan di Kota Semarang sudah tidak dapat menampung volume kendaraan yang ada,

apalagi pada hari libur yang peningkatan volume kendaraannya sangat tinggi. Di samping terjadi kemacetan, juga timbul masalah dalam penyediaan lahan parkir. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 dipaparkan bahwa:

Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang / barang (bermotor / tidak bermotor) pada suatu tempat parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu;

Parkir menjadi salah satu masalah serius di Kota Semarang termasuk di kota-kota besar di Indonesia lainnya seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung. Masalah parkir yang dijumpai adalah banyaknya pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya tidak pada tempat yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan penyempitan badan jalan, sehingga sering kali menimbulkan kemacetan.

Maraknya parkir liar membuat pemerintah Kota Semarang melakukan penertiban parkir dengan pelaksana Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penertiban dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggebosan ban dengan cara mencabut pentil, penggembokan kendaraan serta penempelan stiker pada kendaraan yang parkir di tempat yang dilarang untuk parkir. Namun hal ini dinilai masyarakat (terutama bagi mereka yang melanggar) sebagai cara yang tidak persuasif. Seringkali masyarakat tidak memahami aturan-aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang

tidak seharusnya dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya, atau memarkir kendaraan secara sembarangan.

Gambar 1.1

Kepadatan Lalu Lintas di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang



Sumber: Ibrahim. (2017, Juni 30). *Begini Pengaturan Lalu Lintas di Pusat Oleh-oleh Kota Semarang*. Merdeka.com

Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan di jalan raya seperti pada gambar diatas. Masyarakat seringkali beralasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya rambu larangan parkir. Padahal pada kenyataannya rambu-rambu sudah dipasang sesuai pada tempatnya.

Penataan parkir pada Kota Semarang berdasar pada Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan Tahun 2009 pada pasal 106 ayat 4 bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Disebutkan pada huruf a, b, dan e bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi rambu perintah atau larangan; marka jalan; berhenti dan parkir. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 telah disebutkan bahwa:

Setiap kendaraan yang parkir di suatu tempat parkir harus mematuhi semua rambu-rambu parkir.

Dijelaskan bahwa ketika pengemudi memarkirkan kendaraan, maka harus diparkir pada tempat parkir yang sebenarnya dan harus mematuhi semua rambu-rambu. Beberapa jalan yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Semarang dalam hal parkir diantaranya Jalan Pandanaran, Jalan Pahlawan, Kawasan Simpang Lima, Jalan Pemuda, Jalan Gajahmada dan Jalan Depok. Dalam usaha menertibkan parkir, Pemerintah Kota Semarang menunjuk Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Kota Semarang. Penertiban ini dilakukan pertama kali pada tahun 2014 dengan menggemboskan ban kendaraan.

Jalan yang akan menjadi lokus penelitian penulis adalah Jalan Pandanaran. Jalan Pandanaran merupakan salah satu jalan protokol Kota Semarang yang menghubungkan antara Tugu Muda dengan Kawasan Simpang

Lima. Selain merupakan jalan protokol, Jalan Pandanaran juga merupakan sebuah pusat oleh-oleh jajanan khas Kota Semarang. Terdapat beberapa toko oleh-oleh besar yang sering dikunjungi oleh masyarakat baik masyarakat Kota Semarang atau masyarakat pendatang.

Banyaknya pengunjung yang menuju ke kawasan ini sebanding dengan banyaknya kendaraan yang datang. Pengunjung yang berkunjung ke pusat oleh-oleh Pandanaran tidak hanya wisatawan dengan kendaraan pribadi. Ada pula beberapa kelompok tur yang menggunakan bus cukup besar menurunkan para wisatawannya di Jalan Pandanaran untuk berburu oleh-oleh. Karena ukuran dan keterbatasan gerak, bus-bus besar ini pun hanya asal parkir di sepanjang Jalan Pandanaran. Padahal, jika bus parkir tepat di depan toko oleh-oleh, akan memakan separuh lajur jalan. Kendaraan dari arah Timur ruas Jalan Pandanaran yang seharusnya terbagi menjadi dua sampai tiga lajur, menyempit menjadi satu lajur dan terjadilah kemacetan.

Tidak hanya bus, tetapi kendaraan-kendaraan pribadi pun mengalami kendala yang sama dalam masalah parkir di pusat oleh-oleh Pandanaran. Padahal Pemerintah sudah menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan yang ingin berkunjung ke pusat oleh-oleh Pandanaran yaitu pada Museum Mandala Bhakti dan Jalan Batan. Jalan Pandanaran juga merupakan akses utama dari Semarang Timur menuju Semarang Barat. Sehingga, volume arus kendaraan yang melewati jalan ini pun terbilang cukup padat pada jam-jam tertentu.

Semenjak Desember 2014, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan bahwa Jalan Pandanaran tepatnya pada pusat oleh-oleh, tidak

diperbolehkan untuk menjadi kawasan parkir. Pada saat itu dilakukan operasi oleh Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam rangka menertibkan parkir di Jalan Pandanaran. Dinas Perhubungan melakukan operasi setidaknya seminggu dua kali dan beberapa operasi bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Kota Semarang. Pengendara kendaraan yang melanggar larangan parkir akan ditindak oleh Dinas Perhubungan dengan pemasangan gembok pada ban mobil dan penempelan stiker, sedangkan pada kendaraan roda dua roda dilakukan pengembosan ban. Apabila pengendara berada di sekitar tempat parkir, akan langsung ditilang oleh Satlantas Polrestabes. Pemasangan gembok pada ban mobil atau pengembosan ban mobil memang tidak diatur dalam undang-undang secara jelas. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar parkir agar tidak mengulangi pelanggaran kembali dikemudian hari.

Berikut dilampirkan data jumlah pelanggar parkir pada Jalan Pandanaran Kota Semarang Tahun 2015- Mei 2017.

Tabel 1.2
Pelanggar Parkir di Jalan Pandanaran Kota Semarang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	
		Sepeda Motor (Roda 2)	Mobil (Roda 4)
1.	2015	74 kendaraan	75 kendaraan
2.	2016	76 kendaraan	86 kendaraan
3.	2017	86 kendaraan	93 kendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pada tahun 2014, penertiban baru saja dimulai pada Bulan Desember dan belum ada pendataan secara jelas mengenai jumlah pelanggar di Jalan Pandanaran Kota Semarang. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2015 pelanggar sepeda motor berjumlah 74 kendaraan sedangkan pelanggar mobil berjumlah 75 kendaraan. Kemudian pada tahun 2016 jumlah pelanggar mengalami peningkatan yaitu pelanggar sepeda motor berjumlah 76 kendaraan dan pelanggar mobil berjumlah 86 kendaraan. Pada tahun 2017, pelanggar sepeda motor berjumlah 86 kendaraan dan pelanggar mobil berjumlah 93 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa penataan parkir di Jalan Pandanaran masih jauh dari kata efektif.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki strategi untuk menata supaya pusat oleh-oleh Pandanaran tidak lagi mengalami permasalahan parkir dan menyebabkan kemacetan. Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan parkir di titik-titik tertentu diluar Jalan Pandanaran seperti Museum Mandhala Bakti dan Jalan Batan Selatan. Kemudian disediakan *shuttle bus* dari titik parkir yang mengantarkan pengunjung ke tempat oleh-oleh yang mereka tuju dengan gratis. Akan tetapi hingga kini, masih banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, bahkan di atas trotoar. Mereka berdalih bahwa lahan parkir yang disediakan Pemerintah Kota Semarang terlalu jauh, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama hanya untuk sekedar membeli oleh-oleh. Dikutip dari Koran Harian Sindo edisi 13 Juni 2016, pengunjung toko oleh-oleh menyampaikan pendapatnya bahwa memarkirkan mobil di tempat yang cukup jauh dan harus menaiki shuttle memerlukan waktu yang cukup lama:

“Soalnya hanya beli oleh-oleh sebentar, kalau harus parkir jauh dan menggunakan shuttle ini repot dan tidak praktis,” kata Yudi Santoso, 30, salah satu pengunjung toko oleh-oleh, kemarin. Yudi mengaku belum pernah menaiki moda transportasi *shuttle bus* yang disediakan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, menaiki mobil wara-wiri tersebut membutuhkan waktu lama dan harus parkir di lokasi yang jauh dari pusat oleh-oleh. “Kalau mau jalan-jalan tidak apa-apa menggunakan *shuttle bus* itu, ini hanya sebentar buat beli oleh-oleh, tidak ada 20 menit,” tandasnya.

Pengguna jalan serta pejalan kaki juga merasa dirugikan karena hak mereka sudah diambil oleh orang-orang yang tidak tertib serta tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan. Sementara *shuttle bus* yang difungsikan untuk mengangkut penumpang hanya parkir di beberapa lokasi, termasuk di depan pusat oleh-oleh. Meski sudah hampir setahun beroperasi, minat masyarakat menggunakan *shuttle bus* masih rendah. Hal ini disampaikan oleh koordinator pengawas pada Kawasan Pandanaran Kota Semarang Muhammad Cholid:

“Peminat *shuttle bus* di Kota Semarang sudah lumayan tinggi. Meski begitu, aktivitas pengunjung yang memarkirkan kendaraan di depan toko oleh-oleh juga masih ada hingga sekarang. Untuk mengantar para penumpang belanja oleh-oleh khas Semarang, Pemkot sudah menyediakan *shuttle bus* secara gratis. Setiap hari kami stand by dari pukul 07.00 WIB hingga 22.00 WIB dengan enam armada. Berapa pun penumpang pasti kami antar secara gratis. Namun memang masyarakat yang enggan menggunakan shuttle dan memilih berhenti langsung di depan toko oleh-oleh masih lumayan banyak,”. (Koran Harian Sindo edisi 13 Juni 2016).

Kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya tentu menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Kota Semarang. Kawasan parkir tidak serta

merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum serta memberikan kenyamanan baik kepada penjual maupun pengunjung.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam prasarana dan fasilitas umum khususnya sektor lalu lintas dan perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Semakin banyaknya bentuk pelanggaran masyarakat terhadap lalu lintas membuat pekerjaan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang harus diemban dengan lebih baik. Banyaknya bentuk pelanggaran berlalu lintas juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas dalam menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari model penyaluran saran yang dinilai tepat dan mampu untuk meningkatkan efektivitas program penataan parkir, maka penulis mengambil judul: “EFEKTIVITAS PROGRAM PENATAAN PARKIR PADA KAWASAN PUSAT OLEH-OLEH PANDANARAN KOTA SEMARANG”.

1.2.Rumusan Masalah

Masalah didefinisikan sebagai serangkaian atau setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah itu sebagai rintangan yang mesti harus dilalui jalan untuk mengatasinya. Pengertian masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009) adalah suatu hal yang harus diselesaikan (dipecahkan) atau sesuatu yang harus ditemukan jalan keluarnya.

Perumusan masalah digunakan untuk mengungkap pokok-pokok pikiran secara jelas mengenai hakikat dari masalah tersebut. Masalah akan muncul apabila terjadi keadaan dimana terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dari uraian diatas terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut telah di uraikan pada latar belakang, sehingga terdapat beberapa rumusan permasalahan utama yang harus diatasi. Rumusan masalahnya yaitu:

- 1) Bagaimana efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Semarang?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Semarang?

1.3.Tujuan

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan tentang apa yang ingin dicapai oleh penulis atau hasil penelitian dengan menyimpulkan pada usaha

yang mengarah sejumlah pengetahuan yang ingin dipahami dan diteliti.

Sedangkan penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Semarang.
- 2) Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu administrasi publik, khususnya pada bidang efektivitas pelaksanaan program penataan parkir pada Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan wadah dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama mengikuti proses belajar di bangku kuliah.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat mengenai analisis efektivitas program penataan parkir pada Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang saat ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran betapa pentingnya untuk tidak parkir di bahu jalan yang sudah dilarang oleh pemerintah Kota Semarang khususnya pada Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerlinger (Pasolong, 2014) mendefinisikan teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan yang merinci antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.

Teori merupakan sekumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis dan prinsip-prinsip tersebut berusaha untuk menghubungkan antara fenomena-fenomena yang ada. Sederetan konsep yang dipaparkan oleh penulis bertujuan untuk mengungkap masalah terkait dengan analisis efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Semarang.

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung kelengkapan dalam penelitian analisis efektivitas program penataan parkir di kawasan pusat oleh-oleh Pandanaran Semarang, berikut ini merupakan beberapa kumpulan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Adapun pembahasan secara rincinya ialah sebagai berikut:

1. Diteliti oleh Ahmad Nazrin Anuar, Siti Noorbaizura Bookhari dan Noor Azah Aziz, *Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences* Volume 42 Tahun 2012. Penelitian berjudul *The Effectiveness of Safe City Programme as Safety Basic in Tourism Industry: Case Study in Putrajaya*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner yang didasarkan pada pernyataan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini memaparkan tentang aspek kamanan yang menjadi salah satu hal penting bagi wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara. Dengan adanya *Safe City Programme* yang dimulai sejak tahun 2004 memberikan keamanan bagi wisatawan di Putrajaya. Responden diambil dari turis domestik. Hasil penelitian:

Pelaksanaan *Safe City Programme* berjalan dengan baik di Putrajaya, Malaysia. Melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD), Malaysia telah mengambil banyak inisiatif untuk memastikan tingkat keamanan wisata dengan jelas melalui tiga strategi dan langkah-langkah pencegahan kejahatan *Safe City Programme*. Pada aspek konsep atau kebijakan, mayoritas responden menyatakan sangat puas, sedangkan dalam hal efektivitas, pada Shah Alam dan Johor Bahru, sebagian besar responden menyatakan kurang puas karena tingkat keamanan pada Putrajaya masih lemah. Pemerintah perlu bekerja sama dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan keselamatan pada obyek wisata utama.

2. Diteliti oleh Zulfa Emalia, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Volume 6, Nomor 1, Tahun 2013. Penelitian berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memaparkan apakah program yang diberlakukan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin berjalan dengan baik atau tidak.

Hasil penelitian:

Pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian pada tahun 2008-2010 telah memberikan bantuan raskin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang menjadi kelompok target. Kota Bandar Lampung telah memenuhi kriteria berdasarkan Pedoman Umum Raskin, yaitu: tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas. Tepat administrasi dan tepat waktu.

3. Diteliti oleh Aditya Wisnu Priambodo, Priyatno Harsanto dan Muhammad Adnan, *Journal of Politic and Government Studies* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014. Penelitian berjudul Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian

ini mendeskripsikan fenomena pengelolaan parkir pada tepi jalan umum di Kota Semarang. Hasil penelitian:

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki manajemen perparkiran di Kota Semarang baik melalui swakelola maupun kemitraan. Namun upaya tersebut nyatanya belum mampu mengentaskan parkir tepi jalan umum dari permasalahan yang selama ini membelit. Dalam sepuluh tahun terakhir pergantian sistem dan pengelola yang dilakukan bukan murni berdasarkan atas visi perbaikan manajemen perparkiran di Kota Semarang, namun lebih cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pejabatnya. Praktik nepotisme terbukti ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang. Kebijakan kemitraan yang dibuat pemerintah secara sengaja diputuskan dan diperuntukkan bagi rekanan pejabatnya.

4. Diteliti oleh Rini Puji Lestari dan Indah Murti. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015. Penelitian Berjudul Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus: Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Krian. PNPM merupakan program

yang fokus dan intensif untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Hasil penelitian:

Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri melalui 3 sektor yaitu sektor lingkungan, sektor ekonomi dan sektor sosial. Sebagian masyarakat merasa puas dengan adanya perubahan yang ada pada rumah tangga mereka maupun masyarakat yang lebih layak. Berdasarkan indikator ketepatan sasaran program dan indikator tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan cukup efektif, untuk indikator perubahan nyata setelah adanya program diperoleh hasil sangat efektif, sedangkan indikator ketepatan waktu khususnya pada sektor ekonomi diperoleh hasil efektif.

5. Diteliti oleh Vicente E. Caballo, Gloria B. Carrillo, dan Thomas H. Ollendick, *Journal Behavioral Psychology / Psicología Conductual*, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian berjudul *Effectiveness Of A Social Skills Play-Based Training Program Intervention For Childhood Social Anxiety*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 112 siswa diantaranya 65 siswa laki-laki dan 47 siswa perempuan dari kelas empat, lima dan enam SD. Penelitian ini menyajikan penerapan program sekolah berbasis permainan dalam pelatihan keterampilan sosial untuk anak-anak usia 9 sampai 12 tahun. Hasil penelitian:

Program pelatihan keterampilan sosial berbasis permainan dapat menurunkan tingkat kecemasan sosial pada anak-anak di kelas empat sampai enam. Kecemasan sosial global dan dimensi-dimensi kecemasan sosial Anak-anak pada kelompok yang mendapat campur tangan penuh tersebut menurun secara signifikan. Program ini diberlakukan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan. Namiun sejak program ini diberlakukan kepada seluruh kelas, tidak semua siswa memiliki kecemasan sosial yang tinggi (untuk anak-anak usia 8-14 tahun).

Berikut dilampirkan tabel matriks jurnal penelitian terdahulu secara ringkas untuk mempermudah mengidentifikasi setiap penelitian sebelumnya.

Tabel 1.3
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Judul	Penulis	Hasil / Temuan
1.	<i>Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences</i> Volume 42 Tahun 2012	<i>The Effectiveness of Safe City Programme as Safety Basic in Tourism Industry: Case Study in Putrajaya</i>	Ahmad Nazrin Anuar, Siti Noorbaizura Bookhari dan Noor Azah Aziz	Pelaksanaan <i>Safe City Programme</i> berjalan dengan baik di Putrajaya, Malaysia. Melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD), Malaysia telah mengambil banyak inisiatif untuk memastikan tingkat keamanan wisata dengan jelas melalui tiga strategi dan langkah-langkah pencegahan kejahatan <i>Safe City Programme</i> . Pada aspek konsep atau kebijakan, mayoritas responden menyatakan sangat puas, sedangkan dalam hal efektivitas, pada Shah Alam dan Johor Bahru, sebagian besar responden menyatakan kurang puas

No	Jurnal	Judul	Penulis	Hasil / Temuan
				karena tingkat keamanan pada Putrajaya masih lemah. Pemerintah perlu bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan keselamatan pada obyek wisata utama.
2.	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Volume 6, Nomor 1, Tahun 2013	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung	Zulfa Emalia	Pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian pada tahun 2008-2010 telah memberikan bantuan raskin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang menjadi kelompok target. Kota Bandar Lampung telah memenuhi kriteria berdasarkan Pedoman Umum Raskin, yaitu: tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas. Tepat administrasi dan tepat waktu.
3.	<i>Journal of Politic and Government Studies</i> Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014	Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012- 2013	Aditya Wisnu Priambodo, Priyatno Harsanto dan Muhammad Adnan	Pemerintah Kota Semarang telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki manajemen perparkiran di Kota Semarang baik melalui swakelola maupun kemitraan. Namun upaya tersebut nyatanya belum mampu mengentaskan parkir tepi jalan umum dari permasalahan yang selama ini membelit. Dalam sepuluh tahun terakhir pergantian sistem dan pengelola yang dilakukan bukan murni berdasarkan atas visi perbaikan manajemen perparkiran di Kota Semarang, namun lebih cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pejabatnya. Praktik nepotisme terbukti ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang. Kebijakan kemitraan yang dibuat pemerintah secara sengaja diputuskan dan diperuntukkan bagi rekanan pejabatnya.

No	Jurnal	Judul	Penulis	Hasil / Temuan
4.	Jurnal Penelitian Administrasi Publk Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015	Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus: Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo)	Rini Puji Lestari dan Indah Murti	Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri melalui 3 sektor yaitu sektor lingkungan, sektor ekonomi dan sektor sosial. Sebagian masyarakat merasa puas dengan adanya perubahan yang ada pada rumah tangga mereka maupun masyarakat yang lebih layak. Berdasarkan indikator ketepatan sasaran program dan indikator tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan cukup efektif, untuk indikator perubahan nyata setelah adanya program diperoleh hasil sangat efektif, sedangkan indikator ketepatan waktu khususnya pada sektor ekonomi diperoleh hasil efektif.
5.	<i>Journal Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2015</i>	<i>Effectiveness Of A Social Skills Play- Based Training Program Intervention For Childhood Social Anxiety</i>	Vicente E. Caballo, Gloria B. Carrillo, dan Thomas H. Ollendick	Program pelatihan keterampilan sosial berbasis permainan dapat menurunkan tingkat kecemasan sosial pada anak-anak di kelas empat sampai enam. Kecemasan sosial global dan dimensi-dimensi kecemasan sosial Anak-anak pada kelompok yang mendapat campur tangan penuh tersebut menurun secara signifikan. Program ini diberlakukan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan. Namiun sejak program ini diberlakukan kepada seluruh kelas, tidak semua siswa memiliki kecemasan sosial yang tinggi (untuk anak-anak usia 8-14 tahun)

Sumber: Olahan data peneliti

1.5.2. Administrasi Publik

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrae*” yang berarti “*to serve*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Istilah publik berasal dari bahasa inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, atau negara.

Para ahli memiliki definisi masing-masing mengenai administrasi publik, diantaranya:

1. Chandler & Plano mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (Pasolong, 2014)
2. George J. Gordon merumuskan administrasi publik sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. (Syafiie, 2006)
3. Dwight Waldo dalam Inu Kencana Syafiie (2006:25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
4. Edward H. Litchfield dalam Inu Kencana Syafiie (2006:25) administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan

pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Dari beberapa definisi administrasi publik tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Teori dalam administrasi negara dapat dilacak dari perkembangan paradigma ilmu administrasi itu sendiri, yang pada awalnya paradigma merupakan suatu konsep yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena-fenomena perkembangan ilmu atau cara pandang untuk menganalisis fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Perkembangan paradigma dalam administrasi negara menurut Nicholas Henry terdapat krisis definisi dalam administrasi negara. Untuk memahami administrasi negara lebih lanjut dapat dipahami lewat paradigma. Lewat paradigma ini akan diketahui ciri – ciri dari administrasi negara. Paradigma dalam administrasi negara amat bermanfaat, karena dengan demikian seseorang akan mengetahui tempat dimana bidang ini dipahami dalam tingkatannya sekarang ini.

Administrasi negara telah dikembangkan sebagai suatu kajian akademis melalui lima paradigma. Tiap fase dari paradigma tersebut mempunyai ciri – ciri tertentu sesuai dengan lokus dan fokusnya. Lokus

menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut. Fokus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi. Dalam Yogi Suprayogi Sugandi (2011:10-13) Nicholas Henry mengemukakan lima paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma dikotomi politik administrasi (1900 - 1926)
 Dalam bukunya "*politics and administration*" (1900), Goodnow menyatakan ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintahan. Pertama fungsi politik yang menyangkut kebijakan atau ekspresi kemauan Negara. Kedua adalah fungsi administrasi, yang menyangkut pelaksanaan kebijakan tersebut. Administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Dalam buku "*Introduction to the Study of Public Administration*" (1926), Leonard D. White menyatakan secara tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi publik harus bersifat studi ilmiah dan dapat bersifat "bebas nilai" sedangkan misi pokok administrasi publik adalah efisiensi dan ekonomis. Dalam paradigma pertama ini jelas administrasi publik memberikan penekanan pada lokus, tempat administrasi publik harus berada.
2. Paradigma prinsip – prinsip administrasi publik (1927 - 1937)
 Karangan W.F Wilioughby "*Principles of Public Administration*" (1927), beranggapan bahwa ada prinsip – prinsip administrasi yang bersifat universal, yang dapat ditemukan dan berlaku kapan dan dimana saja. Prinsip administrasi akan berlaku dalam setiap lingkungan administrasi, tanpa memandang segala macam bentuk faktor budaya, fungsi, lingkungan, misi, dan institusi. Dalam periode ini juga hadir Luther Gullick dan Lyndall Urwick, yang mempromosikan tujuh prinsip administrasi: POSDCoRB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Dalam dekade 1940 an, gejolak administrasi publik menampilkan dua arah. Pertama, telah tumbuh kesadaran bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan.
3. Paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (1950 - 1970)
 Administrasi publik mundur kedalam disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan mundur ini berupa pembaharuan definisi mengenai lokus yang ditimpakan pada birokrasi pemerintah, tetapi dengan melepaskan hal – hal yang berkaitan dengan fokus. Periode ketiga ini dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Konsekuensi

dari usaha ini hanya menciptakan lorong studi, yang pada akhirnya dalam pengertian fokus analitis, mengarah pada keterampilan belaka. Periode ini ditandai penekanan lokus, yaitu pada birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956 - 1970)

Istilah ilmu administrasi seharusnya diterjemahkan sebagai sesama studi di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori teori organisasi semula dikembangkan oleh para psikolog, sosiolog, dan para ahli administrasi niaga serta para ahli administrasi publik, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memahami perilaku organisasi. Ilmu manajemen yang lebih bertumpu pada hasil penelitian para ahli *statistic*, analisis sistem, ahli komputer, ekonomi, dan ahli administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari program program secara lebih tepat dan efisien. Jelas paradigma ke empat lebih mementingkan fokus daripada lokus.

5. Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 - sekarang)

Walaupun belum ada kata sepakat mengenai fokus dan lokus dari administrasi publik, tetapi pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin ilmu administrasi publik kembali mendapatkan perhatian yang serius. Perkembangan para ahli administrasi publik semakin terlihat dengan bidang bidang dari ilmu kebijakan dan analisisnya, serta dengan ukuran dari hasil hasil kebijakan. Aspek ini dapat dipandang sebagai suatu pertalian fokus dan lokus dari administrasi publik.

Sedangkan menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (Thoha, 2008: 71) mencoba membagi paradigma administrasi Negara atas tiga kelompok besar, yaitu paradigma *The Old Public Administration* (OPA), *The New Public Management* (NPM) dan *The New Public Service* (NPS). Menurut Denhardt dan Denhardt paradigma OPA dan NPM kurang relevan dalam menangani persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi

Negara, sehingga perlu paradigma baru yang kemudian disebut sebagai NPS.

1. *Old Public Administration (OPA)*

Dalam paradigma OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikotomi politik-administrasi). Berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempratekan sistem nepotisme dan spoil. Karenanya ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan.

2. *New Public Management (NPM)*

New Public Management adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an. NPM menekankan ada kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, serta layanan yang berorientasi customer. NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkaitan dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Fokus dari NPM

sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta.

3. *New Public Service* (NPS)

New Public Service dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma *Old Public Administration* dan *New Public Management* yang dirasa belum memberikan dampak kesejahteraan dan malah menyebarkan ketidak-adilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat harusnya dianggap sebagai warga negara dan bukannya *client* atau pemilih seperti dalam paradigma *Old Public Administration* atau *customer* yang diusung oleh paradigma *New Public Management*.

Berdasarkan uraian tentang paradigma administrasi publik yang telah dijabarkan sebelumnya, secara konseptual terdapat dua fokus dalam teori administrasi publik, yaitu pengelolaan birokrasi (manajemen publik)

dan pengambilan keputusan (kebijakan publik). Peneliti memfokuskan pada paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik yang memiliki fokus pada pengelolaan birokrasi atau manajemen publik yang berbasis *New Public Service* (NPS) yang didalamnya terdapat prinsip memenuhi kepentingan publik.

1.5.4. Manajemen

Manajemen merupakan salah satu cabang ilmu yang terdapat pada disiplin ilmu administrasi publik. Kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh organisasi non-profit menyebabkan pemanfaatan teori-teori strategi dalam pengendalian organisasi tidak dihindari lagi. Berbagai teori dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ikut serta dalam disiplin ilmu manajemen maupun administrasi publik.

1. Marry Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain (Damai Darmadi, 2009).
2. Sondang P. Siagian mengemukakan manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui usaha atau kegiatan orang lain.
3. George R Terry mengemukakan, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

4. Stoner & Wankel (1996:4) mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Pasolong, 2014)

Selain itu, istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama manajemen sebagai ilmu, kedua, manajemen sebagai seni, dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu (Iwan Purwanto, 2012).

- 1) Manajemen sebagai ilmu

Dikembangkan oleh Luther Gulick dimana ia memberikan batasan tentang manajemen dalam sebuah konferensi manajemen internasional, manajemen sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja bersama untuk mencapai sasaran dan menjadikan sistem kerjasama ini lebih berguna bagi kemanusiaan.

- 2) Manajemen sebagai seni

Henry M Boettinger berpendapat bahwa manajemen itu suatu seni. Menurut pandangannya manajemen membutuhkan tiga unsur; pandangan pelaku, pengetahuan teknis, dan komunikasi yang berhasil. Orang pertama yang mencetuskan pandangan bahwa manajemen sebagai seni adalah Marry Parker Follet. Follet menyatakan manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang. Hal ini menekankan bahwa manajemen merupakan ekspresi dan aktualisasi daya cipta, karsa dan rasa manusia yang dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.

- 3) Manajemen sebagai ilmu dan seni

Arti manajemen sebagai ilmu dan seni didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa seorang ilmuwan sekaligus seniman, karena disamping mengandalkan diri pada ilmu, ia juga harus mempunyai firasat, keyakinan, kreativitas dan menguasai cara-cara penerapannya. Ilmu diartikan sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang telah disistematisasi, dikumpulkan dan diterima menurut pengertian kebenaran umum, mengenai keadaan suatu subyek atau obyek tertentu. Seni diartikan sebagai suatu kreativitas pribadi yang

kuat dan disertai keterampilan. Dengan kata lain ilmu mengajarkan suatu pengetahuan dan seni mengajarkan orang untuk berpraktik.

Berdasarkan pengertian dari para ahli, manajemen dapat didefinisikan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.

Manajemen sendiri memiliki beberapa fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, banyak ahli yang mencoba menguraikan pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen, salah satunya George R Terry menjelaskan terdapat empat fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran kebijakan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Bagian terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*). Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut membentuk siklus yang saling berkesinambungan satu sama lain mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengawasan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan manajemen suatu organisasi.

1.5.5. Manajemen Publik

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek – aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik (Harbani Pasolong, 2007: 83). J Steven Ott dkk berpendapat

Manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang sangat menantang, yaitu: (1) privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, (2) rasionalitas dan akuntabilitas, (3) perencanaan dan control, (4) keuangan dan penganggaran, dan (5) produktivitas SDM.

Konsep manajemen publik merupakan perkembangan dari konsep atau model tradisional manajemen. Manajemen Publik yaitu manajemen instansi pemerintah.

Menurut Overman dalam Harbani Pasolong (2007:83), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai manajemen publik dapat dinyatakan bahwa manajemen publik merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi yang dapat diukur dengan kinerja pegawai. Kinerja untuk melayani publik dengan sebaik – baiknya dan publik merasa seluruh kebutuhannya terpenuhi. Manajemen publik memiliki fungsi yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Fungsi manajemen ini dapat digabungkan satu sama lain untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan organisasi.

1.5.6. Efektivitas

1.5.6.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu bagian bentuk penggerakan (*actuating*) dari fungsi manajemen. Hal ini disebabkan efektivitas merupakan salah satu cara untuk menggerakkan fungsi manajemen dan mencapai tujuan dari

perencanaan program. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), kata efektif berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Harbani Pasolong efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. (Harbani Pasolong: 2004)

Robbins dalam Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang dimana efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat

diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones terdiri dari tiga tahap, yakni *input*, *conversion*, dan *output*. *Input* meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap *input*, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap *conversion* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktivitasnya. Sedangkan dalam tahap *output* pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan

keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan memuaskan kebutuhan pelanggan.

1.5.6.2.Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

1.5.7. Perilaku

1.5.7.1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.

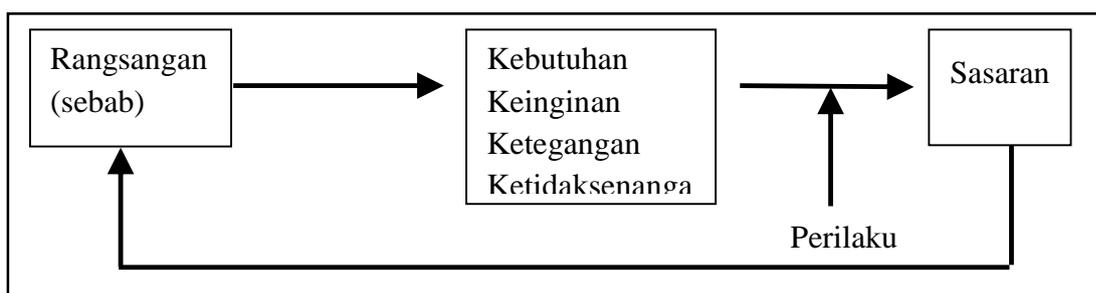
Secara konseptual, menurut Kast dan James E. Roseszweig (2002) perilaku adalah cara bertindak yang merujuk pada tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kegiatannya. Sedangkan Walgito (2003) mengemukakan perilaku merupakan aktivitas-aktivitas individu. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku yang menonjol (*over behavior*) dan perilaku yang tidak menonjol (*innert behavior*). Selain aktivitas-aktivitas tersebut, terdapat pula aktivitas motorik termasuk aktivitas emosional dan kognitif.

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan (Winardi, 2004).

Perilaku dapat diartikan suatu respons organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan atau stimulus. Berarti rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku manusia adalah

aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Model dasar proses perilaku bersifat sama untuk setiap orang.

Gambar 1.2
Model Dasar Proses Perilaku

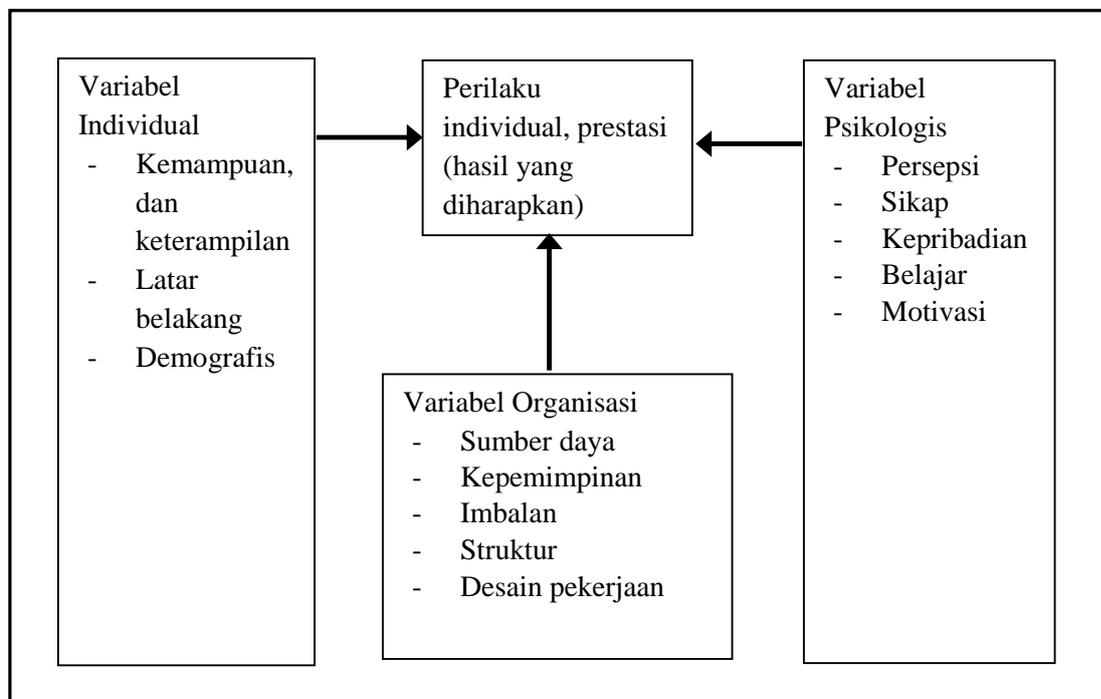


Sumber: Ismail Nawawi, 2009

1.5.7.2. Variabel Perilaku

Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan tempat individu itu berada. Perilaku manusia didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Gibson mengemukakan terdapat tiga perangkat variabel yang memengaruhi perilaku individu dan hal-hal yang dikerjakan individu tersebut, yaitu variabel individu, variabel psikologis, dan variabel keorganisasian.

Gambar 1.3
Variabel Individu



Sumber: Herman Sofyandi, 2007

Kerangka kerja yang umum menunjukkan bahwa perilaku tergantung pada tipe variabel. Apabila dinyatakan bahwa \mathbf{B} (perilaku) = $\mathbf{f}(\mathbf{I}, \mathbf{O}, \mathbf{P})$, berarti bahwa perilaku seseorang adalah fungsi dari Individu (I), Organisasi (O), dan Psikologis (P).

1. Variabel Individual

a. Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan penting dalam perilaku individual. Kemampuan merupakan sebuah sifat (yang melekat pada manusia atau yang dipelajari) yang memungkinkan

seseorang melaksanakan sesuatu tindakan atau pekerjaan mental atau fisik.

b. Demografi

Dalam pembelajaran mengenai demografi, terdapat dua hal yang menjadi klasifikasi paling penting, yaitu jenis kelamin dan keragaman ras dan budaya.

2. Variabel Psikologis

a. Persepsi

Gibson mendefinisikan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis.

b. Sikap

Berbagai pendapat yang diungkapkan para ahli, salah satunya menurut Myers (1983) sampai sekitar tahun 1960 para ahli memandang bahwa ada kaitan antara sikap dan perilaku. Menurut Myers perilaku merupakan sesuatu yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling memengaruhi satu dengan yang lain.

c. Kepribadian

Kepribadian amat banyak dipengaruhi oleh faktor kebudayaan dan sosial. Kepribadian seseorang ialah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial,

kebudayaan, dan lingkungan, perangkat variabel ini menentukan persamaan dan perbedaan perilaku individu

1.5.7.3.Prinsip Dasar Memahami Perilaku Manusia

Ilmu perilaku telah banyak mengembangkan cara-cara untuk memahami sifat-sifat manusia. Konsep tentang manusia itu sendiri telah banyak dikembangkan oleh para peneliti perilaku. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia adalah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian dari perilaku. Menurut Miftah Thoha (2014) prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- 1) Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama
Prinsip dasar kemampuan amat penting diketahui untuk memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan orang lain. Kemampuan yang terbatas membuat seseorang bertingkah laku yang berbeda.
- 2) Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda
Manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Dengan kebutuhan ini dimaksudkan adalah beberapa pernyataan di dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapainya sebagai suatu obyek atau hasil.
- 3) Orang berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak
Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Di dalam banyak hal, seseorang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya.
- 4) Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya.
Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif ini melibatkan seseorang individu mengakui secara selektif aspek-aspek yang berbeda dari lingkungan, menilai apa yang dilihatnya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu, dan mengevaluasi apa yang dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilainya.

- 5) Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang (*affective*)

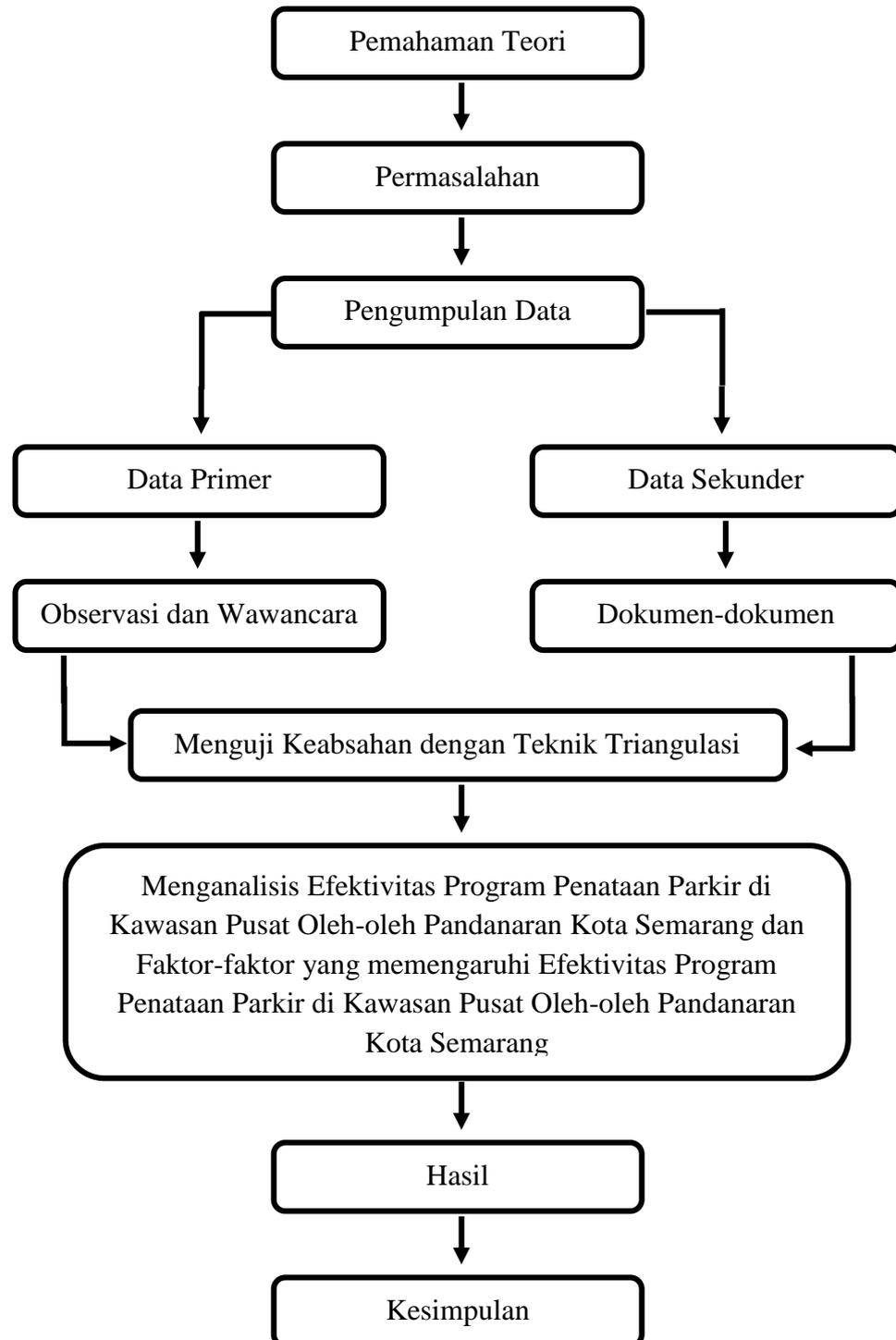
Orang-orang jarang bertindak netral mengenai sesuatu hal yang mereka ketahui dan alami. Dan mereka cenderung untuk mengevaluasi sesuatu yang mereka alami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan tersebut akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal.

1.5.8. Alur Pemikiran

Untuk mempermudah melihat langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini maka peneliti membuat alur atau konsep penelitian sebagai pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4

Alur Pemikiran dalam Penelitian



1.6.Operasionalisasi Konsep

Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di bahu jalan karena hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada kendaraan yang memarkirkan di sepanjang Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran. Padahal sudah disediakan lahan parkir yang memadai dan disediakan transportasi dari tempat parkir menuju Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran. Hal ini menunjukkan bahwa program penataan parkir tidak efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1. Tingkat efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang, menggunakan tiga pengukuran, yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan program dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang kemudian diidentifikasi untuk mengetahui bagaimana pencapaiannya.

- i. Kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Kota Semarang.
- ii. Tingkat kepadatan lalu lintas Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang.

b. Integrasi

Dalam mewujudkan kawasan bebas parkir, diperlukan integrasi baik dari pemerintah, pengunjung, maupun pemilik-pemilik toko yang ada pada Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang.

- i. Bentuk kerja sama Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Kepolisian dalam penerapan program penataan parkir.
- ii. Bentuk partisipasi pedagang Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang terkait program penataan parkir.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang, adaptasi perlu dilakukan baik dari pemilik toko maupun pengunjung. Bagaimana tingkat adaptasi setelah adanya program penataan parkir.

- i. Kondisi Kawasan Pusat Oleh-oleh sebelum dan sesudah penerapan program penataan parkir.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang

a. Sarana prasarana (faktor fisik)

Sarana prasarana yang diperlukan dalam program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang adalah lahan parkir. Tersedianya lahan parkir yang sesuai dan disukai masyarakat

akan menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat dalam efektifnya program penataan parkir.

- i. Kondisi lahan parkir Museum Mandala Bhakti dan Jalan Batan Selatan.
 - ii. Pemanfaatan shuttle gratis yang disediakan.
- b. Perilaku (faktor non fisik)

Perilaku yang akan diteliti yaitu perilaku baik dari aparatur, pengunjung maupun pemilik toko juga menjadi faktor yang memengaruhi dalam efektif atau tidaknya program penataan parkir pada Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang.

- i. Pemanfaatan lahan parkir di Museum Mandala Bhakti dan Jalan Batan Selatan oleh pengunjung.
- ii. Pemanfaatan shuttle gratis oleh pengunjung.
- iii. Jumlah pengunjung sebelum dan setelah penerapan program penataan parkir.
- iv. Pendapat pengunjung maupun pedagang mengenai program penataan parkir.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Keith F. Punch dalam Nugroho (2014: 28) mengelompokkan penelitian menjadi:

1. Penelitian kuantitatif

2. Penelitian kualitatif
3. Penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif

Pada penelitian pendekatan kualitatif, yaitu satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Sifat humanis dari aliran pemikiran kualitatif terlihat pada pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial.

Bogdan dan Taylor, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga pada penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif akan memberikan gambaran atau uraian berupa tulisan hasil dari perilaku masyarakat yang diamati, dan menjelaskan secara mendalam atas fenomena penelitian yang dilihat dalam masyarakat tersebut.

Pada umumnya penelitian dapat digolongkan ke dalam tipe penelitian, yaitu (Pasolong, 2012:75):

- 1) Penelitian Eksploratif (Penjajakan)
Penelitian eksploratif yaitu suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memunyai hipotesa, pengetahuan, penelitian tentang gejala yang ingin diteliti masih kurang, sehingga penelitian penjajakan sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian penjelasan maupun penelitian deskriptif. Melalui eksploratif (penjajakan) masalah penelitian dapat dirumuskan lebih jelas dan lebih terperinci.
- 2) Penelitian Eksplanatory (Penjelasan)
Penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan.

3) Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi saat melakukan penelitian, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi.

Sugiyono dalam Pasolong (2012:161) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yakni peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah yang ada setelah melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti dan hasil pikir dengan menggunakan pengukuran dan menarik kesimpulan dengan kondisi dan waktunya.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana persoalan penelitian tersebut terjadi. Fokus penelitian ini adalah analisis Efektivitas Program Penataan Parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang. Pengambilan data dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai Informan. Informan adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penelitian kualitatif ini sehingga informan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. penentuan narasumber yang bergulir sesuai arahan dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Narasumber menggunakan teknik *snowball* ini berfungsi untuk memperdalam informasi dalam penelitian ini (dalam Sugiyono; 2009:218-219).

Dalam penelitian ini, membutuhkan informasi dari *stakeholder* yang terkait dengan efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang, yaitu:

1. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang
2. Ketua Koordinator Lapangan Bidang Parkir di Kawasan Pandanaran Kota Semarang
3. Pemilik Toko oleh-oleh di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang
4. Juru Parkir pada lahan parkir yang telah disediakan Pemerintah Kota Semarang
5. Pengunjung Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang

1.7.4. Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Nugroho (2014: 115), sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-lain, termasuk diantaranya sumber data tertulis, dokumen rekaman suara dan foto, dan data statistik. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data berasal dari jawaban daftar pertanyaan yang diajukan atau ditanyakan kepada informan mengenai efektivitas program penataan parkir di Kawasan Pusat Oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa hasil wawancara dan jawaban atas observasi dengan para pelaku kebijakan.

2) Data Sekunder

Adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa yang sudah ada sebelumnya berupa catatan majalah, dokumen, laporan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa tabel, laporan dan dokumen.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian meliputi:

1) Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

2) Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses *getting along*. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi dan mengamati langsung mengapa penataan parkir pada Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif.

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur, buku-buku dan laman yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu data dapat diperoleh dari alat penangkap gambar maupun alat perekam suara.

4) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari literature dan buku yang relevan dari penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen

resmi, arsip, dan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.7.6. Instrumen Penelitian

Moelong (2007: 4) menjelaskan bahwa instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu juga digunakan pedoman wawancara yaitu wawancara dengan para subyek terteliti dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview Guide*) dan buku catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat semua informasi tentang data yang diperoleh dilapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa teks, kata-kata tertulis atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti dalam menjadi instrument penelitian dibantu dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawanacara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tersebut dibantu dengan berbagai alat alat canggih sehingga membantu peneliti mengumpulkan data, instrumen ini meliputi (Sugiyono, 2014: 81-82):

a. *Interview Guide*

Berfungsi untuk membimbing atau menuntun penulis ketika melakukan sesi Tanya jawab atau wawancara agar terarah. Dengan adanya *interview guide* akan membantu proses wawancara agar tetap fokus dan tidak ada yang tertinggal.

b. Buku catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Selain itu, notebook (komputer berukuran kecil yang dapat dibawa kemana mana) juga dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

c. Alat perekam/ hp

Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat perekam ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan wawancara yaitu dapat menangkap semua percakapan antara informan dan peneliti, sehingga sumber data wawancara menjadi lengkap.

d. Kamera

Berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul betul melakukan pengumpulan data.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moelong, 2007: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan-bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data awal yang dikumpulkan meliputi Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Semarang.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang didapat dari lapangan akan sangat banyak jumlahnya.

3. Uji Keabsahan

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya diuji kebenaran/keabsahan dengan uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.

4. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

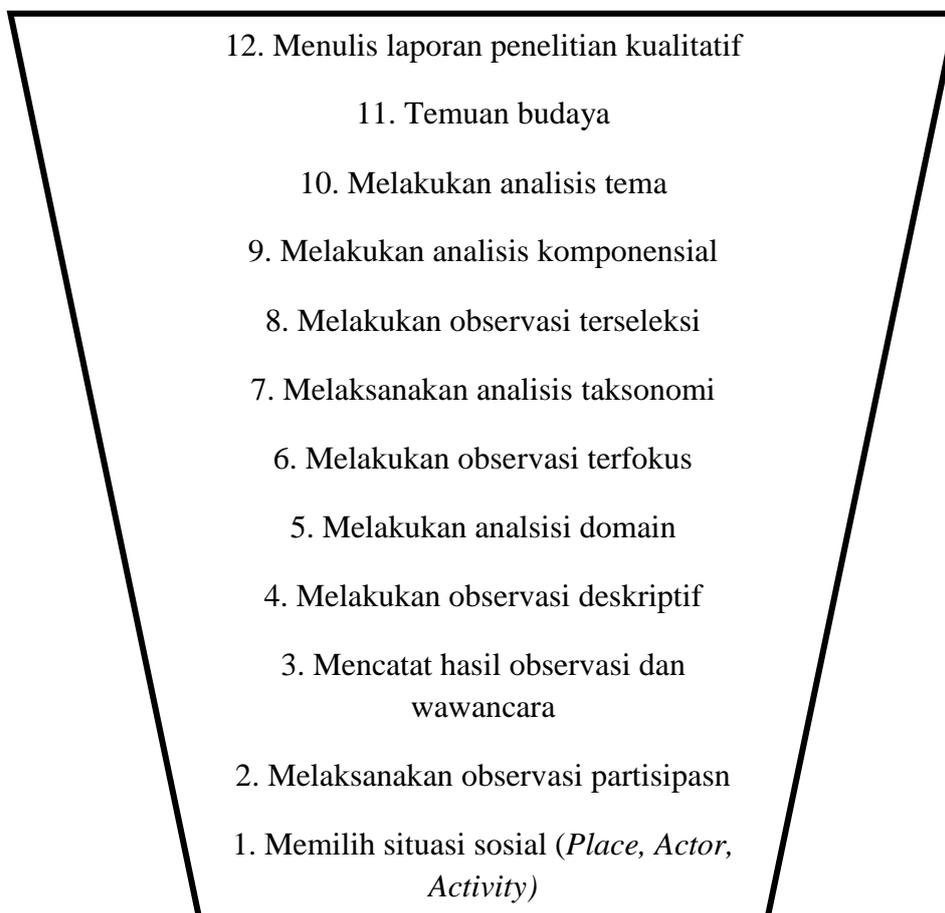
5. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat sementara karena pada suatu waktu dapat berubah jika ditemukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data berikutnya.

Analisis data selama dilapangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Spradley. Spradley (1980) dalam Sugiyono (2016: 345-362) membagi analisis data dalam berbagai tahapan sebagai berikut pada Gambar 1.5:

Gambar 1.5

Tahap Penelitian Kualitatif Menurut Spradley



Sumber: Sugiyono (2016:346)

Analisis data selama dilapangan pada penelitian ini dibagi dalam beberapa langkah sesuai dengan Gambar 1.5. Penelitian ini dimulai dari menentukan *key informan* atau informan kunci; yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau wawancara yang hasilnya dicatat; selanjutnya dianalisis melakukan analisis domain yakni analisis untuk memperoleh gambaran secara umum; dilanjutkan dengan analisis taksonomi yang berusaha menjabarkan domain menjadi lebih rinci dan fokus; kemudian

melakukan analisis komponensial dengan mengontraskan data yang ada; dan selanjutnya analisis tema dengan mencari hubungan antar domain secara menyeluruh.

1.7.8. Kualitas Data

Menurut Creswell & Miller (2012: 286) Validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian kualitatif selain reliabilitas. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca secara umum. Strategi validitas data yang dikemukakan oleh Creswell adalah sebagai berikut:

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan / deskripsi / tema tersebut sudah akurat.
3. Memberikan deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) di lapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya-jawab secara sesama rekan peneliti (*peer de briefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini

mengharuskan peneliti mencari seorang rekan (*a peer debriefer*) yang dapat *mereview* untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain oleh peneliti sendiri.

8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk *mereview* keseluruhan proyek penelitian.

William Wiersma dalam Sugiyono (2016: 372-374), mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan, uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
3. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada Penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

